

KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PEMBERDAYAAN PETANI GARAM DI KABUPATEN CIREBON

Tyas Ayuning Putri¹, Ipik Permana², A. Yusuf Rifa'i³

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

ABSTRAK

Pelaksanaan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan petani garam di Kabupaten Cirebon masih belum optimal. Peneliti menganalisis dan menjawab mengenai permasalahan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan petani garam untuk meningkatkan kualitas garam di Kabupaten Cirebon, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan petani garam untuk meningkatkan kualitas garam dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan petani garam untuk meningkatkan kualitas garam di Kabupaten Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Data diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan indikator dalam penelitian. Hasil penelitian tentang kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan petani garam di Kabupaten Cirebon dilihat berdasarkan indikator kinerja dari Agus Dwiyanto (2012:50) yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas. Dari kelima indikator kinerja seharusnya berjalan optimal tetapi faktanya dilapangan belum optimal hanya beberapa saja yang dikatakan optimal. Adapun faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan petani garam di Kabupaten Cirebon, faktor pendukung: minat petani garam untuk mengikuti pembinaan dari dinas serta adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Cirebon untuk memberdayakan petani garam meningkatkan kualitas garam, faktor penghambat: cuaca, kurangnya lahan integrasi garam, kurangnya sarana prasarana dan teknologi modern serta anggaran yang terbatas.

Kata Kunci: Kinerja, Pemberdayaan, Petani Garam

Latarbelakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Bahwa untuk mewujudkan tujuan bernegara menyejahterakan rakyat, termasuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Negara

menyelenggarakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Petani garam sangat tergantung pada sumber daya, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sehingga

mebutuhkan perlindungan dan pemberdayaan.

Terkait dengan hal tersebut diatas di Indonesia kebutuhan garam sudah tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia sehari-hari saat ini. Tidak hanya terbatas untuk keperluan rumah tangga pada keperluan memasak, lebih dari itu garam juga dibutuhkan sebagai salah satu bahan baku bagi berbagai jenis industri. Ada beberapa sektor Industri yang memanfaatkan garam sebagai salah satu bahan bakunya. Mulai dari industri yang bergerak di sektor pengolahan bahan pangan seperti minyak goreng, makanan jadi, pengasinan ikan. Industri lainnya adalah industri tekstil, kulit, farmasi, hingga perminyakan.

Faktor-faktor yang diperkirakan berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas garam di Indonesia. teknik produksi dan peralatan yang digunakan masih sangat tradisional serta produksi garam yang sangat bergantung pada cuaca yang secara umum hanya memungkinkan memproduksi garam hanya dalam waktu 4 bulan. Masa produksi ini jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan Australia yang iklimnya memungkinkan

untuk memproduksi garam hingga 8 bulan sehingga menghasilkan garam yang jauh lebih banyak dengan kualitas tinggi.

Kabupaten Cirebon sebagai salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Barat yang memiliki potensi garam yang cukup besar, baik garam rakyat atau garam krosok maupun garam konsumsi beryodium. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 78 Tahun 2001 tentang Larangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beryodium. Kualitas produksi garam rakyat atau garam krosok di Kabupaten Cirebon memiliki kualitas III (NaCL kurang dari 90%). Masalah yang dihadapi petani garam di Kabupaten Cirebon terutama menyangkut rendahnya kualitas garam. Rendahnya kualitas garam itu di antaranya kurangnya akses permodalan sehingga banyak yang terjerat oleh tengkulak, masih menggunakan teknologi sederhana, masih kurangnya lahan integrasi garam sehingga produksi garam dari petani menurun, sarana dan prasarana garam belum tertata dan kurang memadai. Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Standar Harga Garam bahwa harga garam kualitas I dipatok Rp750/kg dan kualitas II Rp550/kg. Akan tetapi faktanya patokan

harga tersebut tidak efektif karena tata niaga garam masih belum stabil. Sementara garam yang dihasilkan petani garam di Kabupaten Cirebon selama ini hanya bisa mencapai kualitas II karena rendahnya kualitas garam itu diantaranya dari segi warna kualitas garam petani di Kabupaten Cirebon kurang putih yang diakibatkan kotornya air laut, selain itu tingkat kekeringan kristalisasinya pun kurang.

Paradigma pemerintah daerah saat ini yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran pemerintah dan peningkatan kualitas daerah. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 81 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Pemberdayaan petani garam di tangani oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon tepatnya Bidang Pemberdayaan, peran petani garam sebagai faktor utama keberhasilan untuk

meningkatkan kualitas garam yang diproduksi petani garam. Selanjutnya upaya pemberdayaan diperlukan adanya langkah dan strategi yaitu perlu adanya penyuluhan atau sosialisasi kepada petani garam, bantuan sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai. Perlu adanya pengalokasian sumber dana dari pemerintah dan bantuan dari pemerintah harus tepat waktu dan tepat sasaran. Adanya berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon kinerjanya belum optimal dalam memberdayakan petani garam khususnya di Kabupaten Cirebon yaitu kurang tanggap terhadap kebutuhan petani garam, kualitas pelayanannya kurang seperti memberikan bantuan pengadaan sarana prasarana dan teknologi untuk petani garam meningkatkan kualitas garamnya, dan anggaran yang terbatas.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara jelas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pemberdayaan Petani

Garam di Kabupaten Cirebon yang belum dilaksanakan dengan baik. Menurut Lincoln dalam Moloeng (2010 : 5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

Teknik Pemilihan Informan

Pada penelitian kualitatif pemilihan informan tidak selalu menjadi wakil dari seluruh objek penelitian, tetapi yang terpenting informan memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek penelitian. teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* pada teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan fokus penelitian. Dan yang dijadikan

informan di penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Informan Kunci, yaitu Kepala Bidang Pemberdayaan.
2. Informan Pendukung, yaitu staff pegawai Bidang Pemberdayaan dan petani garam.

Teknik Pengumpulan Data

Ada dua macam data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer akan diambil dari survei yang dilakukan berupa hasil wawancara peneliti dengan informan, sedangkan data sekunder diambil dari hasil studi kepustakaan dan studi lapangan.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

1. Pengumpulan Data, yaitu mencari dan

mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data-data tersebut dicatat.

2. Reduksi Data, yaitu hasil penelitian di lapangan sebagai bahan mentah dirangkum, direduksi, kemudian disusun supaya lebih sistematis untuk mempermudah peneliti di dalam mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan kembali.
3. Sajian Data, yaitu penyajian data dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif untuk memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi.
4. Verifikasi Data, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, diobservasi kemudian peneliti mencari makna hasil penelitian. Peneliti berusaha mencari pola, hubungan serta hal-hal yang sering timbul. Dari hasil penelitian atau data yang diperoleh peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan untuk kemudian diverifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Pemberdayaan Petani

Garam Untuk Meningkatkan Kualitas Garam di Kabupaten Cirebon.

a) Produktivitas

Produktivitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan petani garam masih kurang, dapat dilihat dari kurangnya lahan integrasi garam dan bantuan alat yang canggih untuk petani, hal ini disebabkan oleh anggaran yang terbatas.

b) Kualitas Layanan

Kualitas layanan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan petani garam ada beberapa macam diantaranya pengadaan sumber daya manusia (SDM), pengadaan bantuan sarana prasarana dan alat modern untuk petani garam, diberlakukan sistem integrasi garam. Dalam pengadaan sumber daya manusia (SDM) di Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan petani garam sudah memenuhi syarat kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi. Untuk Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Kelautan dan Perikanan rata-rata S1, walaupun ada yang SMA tetapi sudah dilatih, dan juga mempunyai penyuluh lapangan

yang sudah dilatih secara khusus. Pengadaan bantuan sarana prasarana dan alat modern untuk petani garam masih belum optimal karena belum mencakup semua kelompok petani, yang diberikan bantuan yaitu kelompok petani garam yang sudah berbadan hukum. Diberlakukan sistem integrasi garam juga belum optimal karena belum mencakup semua daerah di Kabupaten Cirebon yang mempunyai lahan untuk memproduksi garam.

c) Responsivitas

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon masih belum optimal dalam hal merespon apa-apa saja yang dibutuhkan oleh petani garam, berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon sebenarnya sudah menanggapi dan mengenali kebutuhan apa saja yang dibutuhkan petani garam tetapi terkendala masalah anggaran yang terbatas sehingga permintaan yang diajukan oleh petani garam masih disesuaikan dengan anggaran yang tersedia sehingga masih belum mampu memenuhi semua kebutuhan petani

garam.

d) Responsibilitas

Pemberdayaan petani garam harus sesuai dengan aturan atau kebijakan yang berlaku. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon dalam pemberdayaan petani garam sudah berkesinambungan, karena dinas memberikan pembinaan rutin setiap bulan kepada kelompok petani garam. Dalam kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku diantaranya menjalankan program yang ditetapkan dinas dan

e) Akuntabilitas

Sebagai organisasi publik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon harus selalu mementingkan kepentingan publik, dalam pemberdayaan petani garam yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, publik yang dimaksud adalah para petani garam, oleh karena itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon harus selalu mementingkan kepentingan para petani garam. Dalam pelaksanaannya dalam memberdayakan petani garam Dinas

Kelautan dan Perikanan sudah cukup baik dengan selalu bertanggungjawab terhadap petani garam yang diberdayakan dan dibina dan juga adanya transparansi anggaran sehingga dapat berjalan sesuai dengan aturan dan tidak adanya kecurangan.

Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Pemberdayaan Petani Garam Untuk Meningkatkan Kualitas Garam di Kabupaten Cirebon

- a) Faktor pendukung kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan petani garam di Kabupaten Cirebon adalah minat petani garam untuk mengikuti pembinaan yang diberikan oleh dinas serta adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Cirebon untuk memberdayakan petani garam meningkatkan kualitas garam.
- b) Faktor penghambat kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan petani garam di Kabupaten Cirebon adalah cuaca, kurangnya lahan integrasi garam, kurangnya sarana prasarana dan teknologi modern serta anggaran yang terbatas.

Upaya Yang Dilakukan Dinas

Kelautan dan Perikanan Dalam Pemberdayaan Petani Garam Untuk Meningkatkan Kualitas Garam di Kabupaten Cirebon

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan petani garam untuk meningkatkan kualitas garam melakukan upaya diantaranya memberikan pembinaan kepada petani garam secara rutin setiap bulan, kami membuat sistem demplot atau prisma agar petani garam dapat panen walaupun musim hujan dan sedang berlangsung pembuatan lahan integrasi garam di Kabupaten Cirebon.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan petani garam di Kabupaten Cirebon belum optimal. Hal ini dikarenakan kurang tanggap terhadap kebutuhan petani garam, kualitas pelayanannya kurang seperti memberikan bantuan pengadaan sarana prasarana dan teknologi untuk petani garam meningkatkan kualitas garamnya, dan anggaran yang terbatas.

Daftar Pustaka

Buku

Abdullah, Ma'ruf. 2014. Manajemen dan

- Evaluasi Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Bintoro dan Daryanto. 2017. Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Gava Media.
- Fahmi, Irham. 2013. Perilaku Organisasi. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Pasolong, Harbani. 2016. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama.
- Wibowo, 2007. Manajemen Kinerja (Edisi Ketiga). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, 2007. Manajemen Kinerja (Edisi Keempat). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Perundang-undangan :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Standar Harga Garam.
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 78 Tahun 2001 tentang Larangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beryodium.
- Dwiyanto, Agus. 2012. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 81 Tahun 2016 tentang fungsi, tugas dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan

Sumber Lainnya:

- <http://validnews.co/MENUJU-INDUSTRI-GARAM-RAKYAT-YANG-MODERN> (diakses pada 29 Januari 2018, pukul 23:00 WIB)
- <http://www.google.co.id/search=sementar+a+garam+yang+dihasilkan+petani+garam+di+kabupaten+cireb+on> (diakses pada 29 Januari 2018,pukul 23.02 WIB)
- <http://mediatani.co/petani-garam-adalah-pahlawan-pangan-nasional/> (diakses pada 14 Februari 2018,pukul 23:21 WIB)
- <http://www.agrotani.com/apa-itu-petani-kenapa-menjadi-petani-2> (diakses pada 15 Februari 2018,pukul 00:10 WIB).